

## Daftar isi

Daftar isi .....	i
Prakata .....	iii
Pendahuluan .....	iv
1 Ruang lingkup .....	1
2 Acuan normatif .....	1
3 Istilah dan definisi .....	1
3.1 ruang .....	1
3.2 tata ruang .....	1
3.3 struktur ruang .....	1
3.4 pola ruang .....	1
3.5 penataan ruang .....	2
3.6 perencanaan tata ruang .....	2
3.7 pemanfaatan ruang .....	2
3.8 pengendalian pemanfaatan ruang .....	2
3.9 rencana tata ruang .....	2
3.10 kawasan lindung .....	2
3.11 kawasan budi daya .....	2
3.12 kawasan perkotaan .....	2
3.13 kawasan pesisir .....	2
3.14 kawasan reklamasi pantai .....	2
3.15 ruang terbuka privat .....	2
3.16 ruang terbuka publik .....	3
3.17 garis sempadan bangunan (GSB) .....	3
3.18 garis sempadan pantai (GSP) .....	3
3.19 garis sempadan sungai (GSS) .....	3
3.20 koefisien dasar bangunan (KDB) .....	3
3.21 koefisien lantai bangunan (KLB) .....	3
3.22 koefisien dasar hijau (KDH) .....	3
3.23 kemudahan publik .....	3
3.24 reklamasi pantai .....	3
3.25 sempadan pantai .....	3
3.26 garis pantai .....	4
3.27 panorama pantai .....	4
3.28 elemen-elemen pantai .....	4
3.29 pasang surut .....	4
3.30 abrasi .....	4
3.31 lepas pantai .....	4
3.32 <i>backshore</i> .....	4
3.33 <i>dune</i> .....	4
4 Ketentuan .....	4
4.1 Ketentuan umum .....	4
4.1.1 Persyaratan .....	4
4.1.2 Tipologi .....	5
4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan .....	6
4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas, dan transportasi .....	6
4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik .....	7
4.2 Ketentuan teknis .....	7
4.2.1 Struktur ruang kawasan .....	7
4.2.2 Pola ruang kawasan .....	8
4.2.3 Pengelolaan lingkungan .....	8
4.2.4 Prasarana dan sarana .....	9

4.2.5	Fasilitas umum dan sosial .....	9
4.2.6	Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasan reklamasi pantai .....	9
5	Tatacara pelaksanaan .....	20
Lampiran A	Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai .....	22
Lampiran B	Tipikal potongan melintang pantai .....	23
Lampiran C	Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik .....	24
Gambar 1	Kemudahan publik dan ruang publik .....	8
Tabel 1	Kriteria struktur ruang dan pola ruang di kawasan reklamasi pantai .....	10
Tabel 2	Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasi pantai .....	16

## **Prakata**

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dipersiapkan oleh Panitia Teknik Standarisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun 2000 melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan BSN No. 9 Tahun 2000. Dalam proses pembahasannya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan dan pedoman yang telah ada untuk meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai, sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan perencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai.

## Pendahuluan

Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui reklamasi pantai.

Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai dimaksud. Dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai diperlukan suatu pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai ini disusun dalam rangka melengkapi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang yang sudah ada. Pedoman ini digunakan dalam penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai yang merupakan bagian dari RTRW Kabupaten/Kota.

Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini hanya berlaku untuk kawasan reklamasi secara umum, sedangkan kawasan reklamasi yang bersifat khusus seperti kawasan reklamasi yang rawan bencana tsunami akan diberlakukan ketentuan khusus yang tidak ditampung dalam pedoman ini.

Pedoman ini bermanfaat bagi :

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota : sebagai acuan dalam penyusunan rencana detail tata ruang pada kawasan reklamasi pantai ;
2. Stakeholder lain : sebagai acuan dalam menentukan kriteria lokasi dan persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai.